

Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Pengembangan BUMDES Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Lampung

Ahmad Hazas Syarif¹⁾, Ahmad Habibi²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

*Email korespondensi: hazassyarif@radenintan.ac.id

Abstract

Higher education plays an essential function and role in the development of Human Resources (HR), this is what makes Indonesians look forward to higher education institutions, especially Islamic colleges, to build skilled and self-sufficient generations. The State Islamic Universities in Lampung is divided into two different institutions, Raden Intan State Islamic University Lampung (UIN RIL) and Metro State Islamic Institute (IAIN Metro) Lampung. Education occupies a strategic position in economic development when high-quality human resources are viewed as the determining factor in successful development. Likewise, most economists agree that human resources are the most decisive factor in character and National development speeds and Economy. This research is a qualitative study, with an entire population of Bumdes in the Lampung province of 1,988 and the identification of samples to 95 BUMDes. The results of this study found that out of 475 BUMDes administrators, there were still a few who had a undergraduate education background (S1), and they are not from state Islamic religious universities, because the contribution of alumni from UIN Raden Intan Lampung and IAIN Jurai Siwo remain limited in the business or partners of the various provinces of Lampung province.

Keywords: State Islamic Religious Universities, BUMDes, Independent Villages.

Saran sitasi: Syarif, A. H., & Habibi, A. (2022). Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Pengembangan BUMDES Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 524-530. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4261>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4261>

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dimana usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara keseluruhan dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan (Adisasmita, 2018). Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai pembangunan nasional yang mendorong adanya pembangunan regional. Dimana pengembangan dan pemberdayaan menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, *bottom-up*. Gagasan seperti ini didasari oleh sebuah cita-cita untuk mengembangkan, merekonstruksi struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang lebih menekankan program implementasi yang bepihak pada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan yang digunakan dalam model pembangunan masyarakat adalah pembangunan tingkat lokal atau menyatu dengan budaya lokal.

Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Menteri Desa, 2015). BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Secara Nasional, desa memiliki potensi yang sangat besar seperti potensi dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, desa wisata maupun desa energi terbarukan. Namun ada beberapa

kendala dalam mengembangkan BUMDes seperti iklim desa yang kurang kondusif, keterbatasan informasi, rendahnya produktivitas, keterbatasan permodalan dan akses pembiayaan, serta rendahnya jiwa kewirausahaan dari para pengelola serta masyarakat.

Begitu juga dengan Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan penggunaan dana desa, terutama untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum seluruhnya memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2018 oleh BPK disebutkan, pemerintah daerah (Pemda) belum memiliki kebijakan yang lengkap dan selaras dengan dana desa. Akibatnya, pemerintah desa belum seluruhnya memiliki regulasi yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, sebanyak 1.034 BUMDes tidak menyampaikan laporan, sebanyak 871 BUMDes pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan, dan 864 BUMDes belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUMDesa. Selanjutnya, sebanyak 585 BUMDes belum didukung oleh pengelola yang kompeten. Selain itu, 547 BUMDes bidang usahanya belum sesuai dengan potensi unggulan desa. Akibatnya, BUMDes belum seluruhnya memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa (Rika, 2019).

Dari keadaan tersebut, Perguruan tinggi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia sangat berharap pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam untuk dapat melahirkan generasi yang terampil dan mandiri. Perguruan Tinggi Islam Negeri di Lampung terdiri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dan Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) Lampung. Maka berdasarkan hal tersebut UIN RIL dan IAIN Metro yang telah menghasilkan banyak lulusan dari semenjak berdirinya sampai dengan sekarang (Bag. Akademik kemahasiswaan UIN RIL dan IAIN Metro) harus mampu menjawab permasalahan yang dialami beberapa BUMDes yang kekurangan SDM. Harapan dari perguruan Tinggi adalah bagaimana lulusannya bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan BUMDes (IAIN Metro, 2017) dan (UIN Raden Intan, 2017).

1.1. Teori Kelembagaan

Kelembagaan (*institution*) adalah organisasi atau kaidah formal maupun informal yang dibentuk untuk mengatur perilaku dan tindakan masyarakat tertentu pada kegiatan sehari-hari maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha (Mubyarto, 2013).

(Alkadafi, 2014) menjelaskan bahwa predikat yang diberikan pada kelembagaan adalah sebagai suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur tindakan masing-masing individu yang bernilai tambahan ataupun berbentuk suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik dan memiliki hubungan dengan perilaku- perilaku ekonomi.

Definisi kelembagaan dapat dipilah dalam dua klasifikasi. Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya merupakan upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada politik dan sosial antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi (Alkadafi, 2014).

1.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi *Asean Economic Community* 2015 (Alkadafi, 2014).

1.3. Pembangunan Desa Mandiri

Pengertian desa diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (12) sebagai berikut “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengertian Desa yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif. Menurut sudut tujuan bidangnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian ekonomi dengan populasi seluruh BUMDes yang ada di Provinsi Lampung sejumlah 1.988 BUMDes (Badan Pusat Statistik, 2019).

Penentuan sampel dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Ukuran sampel

N : Jumlah Populasi

e : Kelonggaran ketidakteilitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir.

Dari hasil perhitungan sampel di atas, maka dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 (dibulatkan) BUMDes. Dengan menggunakan Metode pengumpulan data yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Eksistensi dan Peran Alumni

Alumni sebagai bagian penting dari sebuah lembaga pendidikan dimana dihasilkan, tidak lepas dari keberadaannya yang dapat menentukan eksistensi dan kualitas dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Lembaga pendidikan yang seringkali konsern terhadap keberadaan alumninya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sangat bergantung pada alumni, karena alumni dapat memberikan *feedback* terhadap kemajuan perguruan tinggi tersebut melalui persepsi masyarakat terhadap keberadaan alumninya di tengah-tengah masyarakat, khususnya keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat dan di dunia kerja.

Alumni merupakan produk dari proses pendidikan, atau produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan (Basri, 2011). Hal ini menjelaskan bahwa, sebagai sebuah produk dari proses pendidikan, berarti keberadaan alumni tersebut ditujukan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang telah diterimanya dari perguruan tinggi yang meluluskannya atau bagaimana alumni sebuah perguruan tinggi tersebut bisa memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Alumni memegang peranan penting dalam memberikan masukan terhadap proses dan perbaikan bagi lembaga pendidikan itu sendiri termasuk perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan alumni sesungguhnya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari hasil suatu proses pendidikan, akan tetapi lebih dari itu. Alumni memiliki peran yang penting bagi pengembangan perguruan tinggi, melalui serangkaian proses penelitian terhadap alumni.

Alumni menjadi salah satu aspek pengembangan pendidikan tinggi terkait dengan keberadaan dan peranannya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan alumni dapat dijadikan sasaran pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang ditawarkan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan alumni akan terjun di masyarakat, sehingga jika terjalin kerjasama yang baik dengan

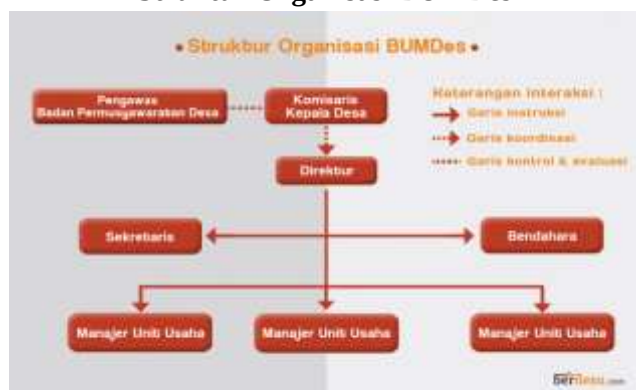
alumni dan alumni dapat bekerja sesuai bidangnya, maka secara tidak langsung bahwa perguruan tinggi telah memberikan peranan dan kontribusi yang baik dan positif dalam pembangunan nasional, dan juga masyarakat akan menilai perguruan tinggi sebagai lembaga yang bermutu dan berkualitas. Artinya Alumni juga mempunyai peran sebagai kontrol evaluasi bagi kemajuan sebuah perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan *feedback* yang dapat diberikan alumni terhadap perbaikan proses belajar mengajar, kurikulum, muatan matakuliah, bahkan terhadap kualitas dosen. Begitu juga dalam penelitian ini diharapkan para alumni mempunyai peranan terhadap pembangunan nasional yang dimulai dari Desa melalui badan usaha milik Desa (BUMDes).

3.2. Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang.

Bagan 1.
Struktur Organisasi BUMDes



Berikut beberapa jenis spesifikasi Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Propinsi Lampung:

a. Unit Lumbung Pangan Desa

Lumbung Pangan adalah sebuah solusi untuk mendukung ketahanan pangan bagi warga masyarakat. Pada saat Musim Panen Harga Hasil

Pertanian rendah namun karena masyarakat terdesak kebutuhan, maka terpaksa mereka harus menjual gabahnya. Tanpa menyimpan untuk cadangan pangan ketika musim paceklik.

b. Unit Serba Usaha

Unit serba usaha yang dilakukan dalam hal ini seperti penyediaan barang kebutuhan pokok warga baik yang bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan dengan harga yang kompetitif sehingga terjangkau bagi warga masyarakat melalui Toserba atau warung kelontong di masing-masing BUMDes. Kebutuhan hidup masyarakat baik dalam bentuk barang (Produk) maupun bukan barang (jasa dan layanan) meningkat setiap saat. Jika di pisahkan berdasarkan prioritas kebutuhan, selain kebutuhan Primer (Sandang, Pangan dan Papan), masih kebutuhan Sekunder dan prioritas. Sebagai contoh: Gas elpiji, Kebutuhan Air Minum, pupuk, Pulsa Listrik, Pulsa Handphone, sewa tarup, Jasa layanan pembayaran angsuran, BRILink, BPJS dll.

c. Unit Pengelolaan dan Edukasi Sampah

Dalam hal ini pengelolaan sampah atau lebih dikenal dengan Bank Sampah. Sama seperti konsep Bank Sampah pada umumnya, dimana sampah milik masyarakat bisa dihimpun dalam sebuah Unit Pengelolaan Sampah Desa yang aktifitas pemilahnya berada di setiap Dusun dengan melibatkan warga setempat. Unit ini memiliki fungsi pemberdayaan yang nyata. Dalam pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pembersihan dan pengepakan sampah. Dalam menjalankan aktifitas pengelolaan sampah, bisa melibatkan dan bekerjasama dengan Komunitas dan pelaku usaha pengelolaan sampah, baik dalam manajemen usaha pengelolaan sampah, maupun teknis pengelolaan sampah. Seperti bekerjasama dengan instansi pemerintah atau perguruan tinggi.

Pendidikan menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi ketika sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Teori pembangunan di masa lampau menganut prinsip bahwa kemiskinan terjadi karena kurangnya kesanggupan untuk menabung dan membangun modal

fisik. Begitu pula, dengan merujuk pada penelitian Agustuti Handayani (Handayani, 2012) menyatakan sebagian besar ekonom sepakat bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Atas dasar pandangan ini, negara-negara maju berinisiatif mendahulukan investasi human capital di bidang kesehatan dan pendidikan.

Masalah pendidikan menjadi kian penting dan strategis karena bisa dijadikan fundamen sosial guna mendorong proses transformasi masyarakat. Pendidikan berkaitan langsung dengan isu-isu krusial seperti, perekonomian (kesejahteraan dan kemiskinan).

Dalam tulisan Agustuti Handayani (Handayani, 2012) dijelaskan bahwa pendidikan memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui dua cara. *Pertama*, pendidikan menciptakan pengetahuan baru yang membawa pengaruh terhadap proses produksi. Pendekatan ini lazim disebut *schumpeterian growth* yang mengandaikan, pertumbuhan ekonomi itu didorong akumulasi modal manusia. Modal manusia, yang diperankan kaum profesional, para ahli, teknisi, dan pekerja, merupakan penggerak utama kemajuan ekonomi. *Kedua*, pendidikan menjadi medium bagi proses difusi dan transmisi pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dapat mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan kultur bekerja. Unsur pengetahuan, teknologi, dan informasi merupakan kekuatan transformatif yang dapat memacu akselerasi pembangunan ekonomi.

Begitu juga Alumni yang merupakan bagian penting dari sebuah lembaga pendidikan, tidak lepas dari keberadaannya yang dapat menentukan eksistensi dan kualitas dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Lembaga pendidikan yang seringkali konsern terhadap keberadaan alumninya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sangat bergantung pada alumni, karena alumni dapat memberikan *feedback* terhadap kemajuan perguruan tinggi tersebut melalui persepsi masyarakat terhadap keberadaan alumninya di tengah-tengah masyarakat, khususnya keberadaannya di tengah keidupan masyarakat dan di dunia kerja.

BUMDes sebagai institusi ditingkat desa memiliki peluang dan tantangan, baik itu dimulai dari proses pembentukan, perjalanan, sampai kepada tahap perkembangannya, begitu juga halnya dengan BUMDes yang terdapat di propinsi Lampung. Dari 95

BUMDes yang terdapat di propinsi Lampung mempunyai berbagai macam pasang surut perkembangan.

Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang menduduki jabatan atau yang masuk ke dalam struktur organisasi. struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan akan konflik. Dan dari 95 BUMDes yang terdapat di propinsi Lampung, para alumni belum masuk ke dalam struktur organisasi BUMDes.

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Berdasarkan hasil penelitian dari data sampel Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Propinsi Lampung yang diteliti telah diperoleh hasil bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah untuk menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif terutama untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang di masing-masing wilayah BUMDes. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah untuk menciptakan pemerataan lapangan usaha dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sebagian besar atau 98% jenis usaha yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat setempat dengan 16% yang sesuai dengan tujuan utama yaitu menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif, sedangkan jenis usaha lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 3 maka hanya tujuan no 1, 6 dan 8 yang telah digunakan sebagai pembentukan BUMDes yaitu Meningkatkan perekonomian Desa, Membuka lapangan kerja serta Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Ini berarti struktur organisasi BUMDes dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu; penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dan struktur organisasi BUMDes yang terdapat di propinsi lampung sudah menunjukkan sesuai dengan aturan Permendes No 4. tahun 2015 Pasal 9 dan 10.

Akan tetapi data dari penelitian yang diperoleh tentang peran dari perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dalam penelitian ini fokus pada kontribusi alumni dari UIN Raden Intan Lampung dan IAIN Jurai Siwo Metro dari 475 pengurus BUMDes yang diteliti masih sedikit yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) dan tidak berasal dari perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, tetapi mereka masih terbatas dalam pelaku usaha atau mitra dari BUMDes masing-masing wilayah Kabupaten Propinsi Lampung. Hal tersebut tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari lingkungan masing-masing lingkungan agar bisa memperhatikan dan memahami kondisi para anggota masyarakat yang dipimpin.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) belum mempunyai peran langsung dari sisi alumni yang terlibat ke dalam struktur organisasi BUMDes di propinsi Lampung. Para alumni masih terlibat ke dalam unit usaha yang terdapat dalam BUMDes.

5. REFERENSI

- UIN Raden Intan. (2017). *Rencana Strategis UIN Raden Intan Lampung 2017-2021*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Adisasmita, R. (2018). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Expert.
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal* , 5(1). *El- Riyasah* , 32-39.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Data BPMD Tahun 2019*.
- Basri, S. H. (2011). Eksistensi dan Peran Alumni dalam Menjaga Kualitas Fakultas Dakwah. *Dakwah* , 137-158.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro. *Jurnal Politik Muda* , 116-125.
- Coristya Berlian Ramadana, H. R. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1068-1076.
- Handayani, A. (2012). Posisi Strategis Pendidikan Tinggi Dalam Pembangunan Ekonomi. *Publica* , 66-73.
- IAIN Metro. (2017). *Renstra IAIN Metro 2015-2019*. Lampung: IAIN Metro.
- Menteri Desa, P. D. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Indonesia.

Mubyarto. (2013). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 115-130.

Rika, H. (2019, Mei 29). *BPK: BUMDes Belum Berkontribusi Penuh pada Ekonomi Desa*. Dipetik Mei 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190529101814-532-399423/bpk-bumdes-belum-berkontribusi-penuh-pada-ekonomi-desa>